

**KUMPULAN PERATURAN TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL YANG SEBAGIAN SUDAH DI CABUT
(TERBARU MEI 2022)**

1) Undang- Undang

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019);

2) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3) Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

1. Permendagri Nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman pendataan penduduk non permanen, tanggal 26 Januari 2015
2. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80), tanggal 15 Januari 2015
3. Permendagri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan KPA Dana TP Bidang Dukcapil
4. Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional
5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang pedoman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

6. Permendagri Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus
7. Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Juknis penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
8. Permendagri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi
9. Permandagri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota
10. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
11. Permendagri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tatacara penyesuaian/ inpassing serta pelaksanaan tugas jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan.
12. Permendagri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan, dan Tatacara penyesuaian/ inpassing, serta pelaksanaan tugas jabatan fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
13. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
14. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
15. Permendagri Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.
16. Permendagri Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK.
17. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
18. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan; dan
19. Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
20. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan
21. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
22. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
23. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan
24. Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota
25. Permendagri Nomor 60 tahun 2021 tentang pengangkatan, pemberhentian, dan penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di provinsi dan kabupaten/kota, tanggal diundangkan 30 Desember 2021
26. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
27. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
28. Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen.

5) Surat Edaran Mendagri

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/4954/SJ tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun, tanggal 31 Agustus 2015
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/10886/Dukcapil tentang Sertifikasi Manajemen Mutu Adminduk, tanggal 1 Oktober 2015
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 47144/12160/Dukcapil tentang Pendataan Penduduk Rentan Adminduk, tanggal 29 Oktober 2015
4. Surat Edaran Mendagri Nomor 489/6795/SJ Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat secara langsung dan tidak langsung di lingkungan Mendagri, tanggal 7 November 2015
5. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/6499/SJ tentang Anggaran Adminduk di daerah 2016, tanggal 18 November 2015
6. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/13636/Dukcapil tentang pengembangan SDM SIAK di pusat dan daerah, tanggal 30 November 2015
7. Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/13243/Dukcapil tentang Pelaksana Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA), tanggal 7 Desember 2016
8. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/482/Dukcapil tentang penegasan kembali atas pengembangan SDM SIAK di Daerah, Tanggal 14 Januari 2016
9. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/134/Sj tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Adminduk di Provnsi dan Kabupaten/Kota, tanggal 18 Januari 2016
10. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/296/SJ tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berlaku seumur hidup, tanggal 29 Januari 2016
11. Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/10231/Dukcapil tentang Format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, tanggal 29 September 2016
12. Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/13243/Dukcapil tentang Pelaksana Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA), tanggal 7 Desember 2016
13. Surat Edaran Mendagri Nomor 471/13/2051/Dukcapil tentang Penerbitan Surat Keterangan pengganti KTP-el maupun surat keterangan telah terdata dalam Database Kependudukan, tanggal 20 Februari 2017.
14. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/14493/Dukcapil.Ses Tentang Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, dan Perkawinan.
15. Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/12205/DUKCAPIL Tentang Mekanisme Pengisian Jabatan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6) Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);

7) Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 5) **sudah di cabut**;
2. Perbup Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan bagi Penduduk Kabupaten Bandung **sudah di cabut** ;
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pendataan Penduduk Non Permanen di Kabupaten Bandung;
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung;
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bandung;
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Bandung;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung;
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan bagi Penduduk Kabupaten Bandung (telah dicabut oleh pasal 111 ayat (2)
9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Bandung.
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Di Kabupaten Bandung.

Soreang, Mei 2022

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan

Imas Chitrawati Sunarya, SE.,M.Si

NIP. 19710720 199703 2 006